

**ANALISIS PELAPORAN PERSEDIAAN DENGAN MENGGUNAKAN
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN (ASAP) PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Endang

Program Studi S1 Akuntansi STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : endangsriyani.nurdin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) dalam membantu pelaporan persediaan menggunakan komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Metodologi penelitian secara kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu melalui wawancara dan observasi dengan admin operator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan Aplikasi ASAP bahwa dalam penginputan data persediaan sering terjadi ketidaksinkron antara kode akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan kode akun yang tersedia dalam aplikasi dan kendala umum yang terjadi diantaranya jaringan dan kesiapan tenaga operator yang mampu mengoperasikan ASAP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaporan dengan menggunakan ASAP sangat membantu mempermudah pelaporan persediaan secara terintegrasi dengan OPD pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin lebih cepat dan tidak harus menunggu pada akhir tahun karena masing-masing admin OPD dapat mengakses data persediaan yang ada pada masing-masing OPD, namun adanya kendala berbeda kode akun yang ada di LRA sesuai nomenklatur dan aplikasi yang tersedia dalam Aplikasi ASAP, sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam penginputan dan perlu dilakukan penyesuaian dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu memberikan pendampingan operator, pengecekan/pemeriksaan rutin, update aplikasi terbaru dan disesuaikan dengan nomenklatur dalam pelaporan keuangan serta melakukan sosialisasi/pelatihan bagi operator ASAP.

Kata kunci : Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan, Persediaan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Persediaan (*inventory*) merupakan bagian dari aset lancar yang dimiliki oleh suatu entitas yang dibeli dengan tujuan untuk digunakan dalam operasional atau untuk dijual kembali. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan pencatatan dan pelaporan atas persediaan diperlukan anggaran sebagai dasar pembanding dan alat pengendalian untuk melihat ketercapaian pemakaian dan sisa persediaan yang belum digunakan, untuk mempermudah dalam mengontrol penggunaan persediaan ini diperlukan suatu sistem yang terpadu sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya secara jelas, akurat dan efektif dan hal tersebut dapat meningkatkan kinerja instansi secara transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan persediaan. Hal ini seiring dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan keharusan pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan pengendalian intern pemerintah dengan sebaik-baiknya.

Persediaan pada instansi pemerintah adalah merupakan aset lancar yang meliputi barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa selama ini selain aset tetap, aset lancar khususnya persediaan menjadi salah satu permasalahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah mengingat banyak sekali jenis persediaan yang dimiliki oleh seluruh perangkat daerah serta sistem pencatatan yang digunakan masih secara manual. Namun untuk mengantisipasi kendala tersebut sejak tahun 2017 pemerintah daerah telah menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) untuk mempermudah pencatatan persediaan yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil wawancara penulis dengan operator Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan diketahui bahwa aplikasi membantu dalam mempermudah

pencatatan persediaan namun kurangnya menu yang tersedia pada aplikasi tersebut serta jenis persediaan namun berbeda kode rekening belanja yang dimasukkan membuat banyak operator OPD yang mengalami kekeliruan dalam penginputan dan pencatatan yang menyebabkan data yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi yang ada seperti barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang berupa fisik/bangunan yang belum bisa dicatat sebagai pengeluaran apabila belum melampirkan Berita Acara Serah Terima Kepada Masyarakat/Pihak ketiga meskipun kondisi bangunan telah selesai/telah digunakan.

Hasil hitopesa sementara diketahui terdapat kelemahan dari ASAP itu sendiri dimana setiap bulannya masih sering terjadi selisih pencatatan persediaan mengingat data yang digunakan sebagai dasar laporan persediaan adalah data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sedangkan terkadang dilapangan terdapat persediaan yang sudah diterima tetapi belum bisa tercatat dalam SP2D karena telah diajukan untuk dicairkan sebagai persediaan baru diajukan kembali di periode berikutnya. Sehingga penginputan data harus dilakukan berkali-kali. Secara teknis itu merupakan kendala daei penggunaan ASAP, Namun berdasarkan data yang penulis peroleh diketahui bahwa selama tahun 2017-2019 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui pemerintah daerah telah melaporkan laporan keuangannya dan laporan keuangan diaudit yang tercepat di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu:

1. Apakah penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) membantu dalam percepatan pelaporan persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mensinkronisasikan catatan persediaan dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) dalam percepatan pelaporan persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk untuk mensinkronisasikan catatan persediaan dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP).

I.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan masukan bagi Pemerintah daerah dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) sehingga membantu dalam percepatan pelaporan persediaan sebagai bagian dari laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Akuntansi Persediaan

2.1.1. Defenisi Persediaan

Menurut Kieso (2015:402), persediaan (*Inventory*) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2. Jenis-Jenis Persediaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jenis jenis persediaan terdiri dari:

1. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*)
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi

- c. Barang dalam proses produksi
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan
 - e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis
2. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari:
- a. Barang habis pakai
 - b. Barang tak habis pakai
 - c. Barang bekas pakai
3. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri dari:
- a. Barang konsumsi
 - b. Amunisi;
 - b. Bahan untuk pemeliharaan;
 - c. Suku cadang;
 - d. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - e. Pita cukai dan leges;
 - f. Bahan baku
 - g. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - h. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - i. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - l. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

2.1.3. Pengakuan, Pengukuran dan Metode Penilaian Persediaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan:

1. Metode perpetual,

- a. Biaya perolehan
- b. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - 1) Potongan harga,
 - 2) Rabat, dan lainnya yang serupa
2. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.
3. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:

1. Metode FIFO, Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:
 - a. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - b. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - d. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - e. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat /pemda
2. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2.1.4. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan *Stock Opname* (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

2.1.5. Perlakuan Khusus Persediaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlakuan khusus persediaan dilakukan apabila:

1. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
2. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran – pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
3. Ada kalanya unit pemerintah, karena tugas dan fungsinya, menerima hibah berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang (Contohnya pada Kementerian Sosial). Dalam hal ini, persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

2.2.2 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan tentang posisi keuangan yang relevan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah dapat menggunakan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga bisa digunakan sebagai menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Diamond, (2012:34) Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan hutang yang mereka kelola.
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

Fahmi (2015:5) yang menyatakan bahwa dengan adanya laporan laporan keuangan yang disediakan manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan mendatang.

2.3 Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan

2.3.1 Pengertian Aplikasi Persediaan

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2017:16), Aplikasi Persediaan adalah aplikasi yang digunakan untuk membukukan dan melaporkan barang persediaan di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB). Aplikasi ini berbasis desktop

yang mana agar dapat digunakan harus di install di desktop. Aplikasi untuk persediaan ini terdiri dari Aplikasi Database SIMAK BMN dan Persediaan 2010 dan Aplikasi Persediaan 2010 yang harus tertanam secara bersamaan. Aplikasi Persediaan harus terkoneksi dengan Database SIMAK BMN dan Persediaan untuk digunakan dalam membukukan dan melaporkan Barang Persediaan. Aplikasi Database Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dan Persediaan dan Aplikasi Persediaan akan selalu di-update apabila terjadi perubahan-perubahan baik perubahan dalam sistem aplikasinya (*application*) maupun dalam data-data pada tabel referensinya. Untuk itu *user* harus senantiasa memperhatikan perkembangan *update* aplikasi.

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2017:4), Database MySQL SIMAK BMN dan PERSEDIAAN merupakan aplikasi yang memuat perangkat-perangkat penting atau fitur-fitur yang dibutuhkan dalam pembukuan dan pelaporan barang milik negara, yang di dalamnya antara lain memuat database untuk persediaan (dbsedia10), database untuk BMN (dbbm10), seperti fitur tabel barang: golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok, fitur tabel wilayah, tabel kanwil, tabel transaksi, dan fitur-fitur lainnya. Aplikasi ini akan terkoneksi dengan Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK BMN sehingga kedua aplikasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi Database MySQL SIMAK BMN dan PERSEDIAAN yang terakhir dikeluarkan adalah versi dbbm10 dengan mysql-connector-odbc-3.51.27- win32 menggantikan dbbm dengan mysql-connector-odbc-3.51.20-win32. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir alasan utama yaitu perubahan penggolongan dan kodefikasi BMN dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010. Instalasi database MySQL SIMAK BMN dan PERSEDIAAN 2010 tidak akan menghapus database MySQL SIMAK BMN dan PERSEDIAAN 2009 karena instalasi aplikasi ini akan terbentuk dalam folder yang terpisah, dimana database MySQL SIMAK BMN dan PERSEDIAAN 2010 terbentuk dalam *folder c:\programfiles\dbbm10* sedangkan database MySQL SIMAK BMN dan PERSEDIAAN 2009 terbentuk dalam *folder c:\program files\dbbm*.

2.3.2 Langkah-langkah Aplikasi Persediaan

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2017:38), Langkah awal untuk penggunaan Aplikasi Persediaan adalah masuk ke Menu Administrator. Menu administrator terdiri dari Referensi, Utility dan Keluar. Menu Referensi di menu administrator ini digunakan untuk mendaftarkan OPD mulai dari kode UAPB, kode UAPPB-E1, kode UAPPB-W dan kode UAKPB. Untuk keperluan tersebut, Referensi juga dilengkapi dengan Tabel Kanwil, khusus untuk Kementerian Keuangan dan Tabel Wilayah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan UAPPB-W. Selanjutnya, setelah mendaftarkan OPD (UAKPB) dilanjutkan dengan mendaftarkan *user* atau membuka akun untuk operator melalui menu *utility*. Operator dapat mengisi identitas *user* dan identitas OPD dalam *user account* yang disediakan dalam menu *utility*. Setelah memiliki akun, operator (*user*) dapat melanjutkan dengan *login* ke menu operator melalui menu *log-off* pada menu Keluar. Sebelum melakukan *input* transaksi pada Aplikasi Persediaan 2010, untuk OPD yang telah memiliki data sebelumnya di Aplikasi Persediaan 2009 harus mengubah data melalui Aplikasi Konversi Persediaan agar data dari Aplikasi Persediaan 2009 tersebut bisa dibawa ke Aplikasi Persediaan 2010. Perubahan ini disebabkan karena adanya perubahan penggolongan dan kodefikasi BMN yang dimuat dalam Aplikasi Persediaan 2009 berbeda dengan yang dimuat pada Aplikasi Persediaan 2010, yaitu perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.6/2007 berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.6/2010.

Penggunaan menu Operator pada Aplikasi Persediaan dimulai dengan mengisi beberapa tabel di Menu Referensi, yaitu mengisi Tabel Barang untuk membuat Daftar Kode Barang Persediaan dan Tabel Penandatanganan, yaitu untuk menginput Penanggungjawab UAKPB dan Pengelola Barang Persediaan. Selanjutnya operator dapat melakukan *input* terhadap transaksi persediaan yang terdiri dari Persediaan Masuk, Persediaan Keluar, Koreksi, Hasil *Opname* Fisik, penghapusan Usang/Rusak dan Konversi Hasil Migrasi. Hasil dari *input* transaksi dapat dicetak pada Menu Laporan, yang terdiri dari Buku Persediaan, Laporan Persediaan, Laporan Rincian Persediaan, Laporan Posisi Persediaan di Neraca, Laporan Mutasi Persediaan dan Daftar Transaksi Persediaan. Laporan Persediaan selanjutnya akan dikirimkan ke Aplikasi SIMAK-BMN untuk bahan penyusunan

neraca yang akan dibuat di Aplikasi SAKPA. Fasilitas kirim/batal kirim, penerimaan data dari UAPKPB, backup, restore, pengosongan data, pengosongan referensi dan proses tutup tahun dapat dilakukan menggunakan Menu *Utility*. Dengan penyediaan menu yang lengkap dari Aplikasi Persediaan 2010 ini memudahkan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang untuk membukukan dan melaporkan Barang Persediaan dengan akurat dan tepat waktu.

III. Metodologi Penelitian

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2021.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan operator/admin ASAP. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah dokumen–dokumen yang berkaitan dengan persediaan dan Laporan Realisasi Anggaran.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu teknik analisis data yang dilakukan bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan admin OPD Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

IV. Pembahasan

4.1 Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) membantu dalam percepatan pelaporan persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin

ASAP adalah sistem komputerisasi yang di rancang untuk membantu proses pengolahan data persediaan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Maksud penggunaan ASAP adalah untuk mempercepat dalam pelaporan persediaan secara terintegrasi dari seluruh OPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari data pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Proses pelaksanaan kerja ASAP untuk pengelolaan persediaan terkait mengenai proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah output. Dari Hasil Wawancara dengan pihak terkait diperoleh bahwa dalam aplikasi ASAP terkendala pada saat penginputan data kurangnya menu yang tersedia pada aplikasi, berbeda kode rekening belanja yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan yang ada dalam yang aplikasi ASAP, sehingga membuat operator OPD yang mengalami kekeliruan dalam penginputan yang menyebabkan data yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi yang ada seperti barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang berupa fisik/bangunan yang belum bisa dicatat sebagai pengeluaran apabila belum melampirkan Berita Acara Serah Terima Kepada Masyarakat/Pihak ketiga meskipun kondisi bangunan telah selesai/telah digunakan. Kendala selanjutnya dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi ASAP adalah jaringan dan sumber daya manusia yang kurang optimal.

Metode yang digunakan dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) menggunakan metode *prototyping* dimana model kerja sistem informasi ini belum lengkap perlu adanya perubahan dan penyesuaian, terutama pengkodean dan nama akun yang disesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat memudahkan dalam proses penginputan dan menghasilkan output yang akurat. Metode ini hanya menggunakan perangkat lunak sebelumnya yang telah di pergunakan sebagai perangkat pendukung, *prototyping* adalah bahasa pemrograman tingkatan yang tinggi, sistem penggunaan instruksi dan simbol-simbol disertai dengan perangkat komputer yang memadai.

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa dalam memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan Barang secara akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP). Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) merupakan sebuah aplikasi manajemen barang atau integratif yang dibuat untuk membantu staf Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merencanakan, menatausahakan, menginventarisasi, dan membuat laporan terkait dengan barang atau aset daerah. Tujuan dari penggunaan aplikasi ini adalah agar operator dari setiap OPD untuk menggolongkan belanja sesuai item-item yang ada secara keseluruhan dan dapat mempermudah pada saat mengecek saldo persediaan secara rinci/detail pada saat *stok opname* hal tersebut membantu setiap OPD dalam menghitung rincian per item persediaan dalam penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahun, namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan dari ASAP itu sendiri dimana setiap bulannya masih sering terjadi selisih nilai persediaan jika dibandingkan dengan data yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta persediaan yang sudah diterima tetapi belum bisa tercatat dalam SP2D karena telah diajukan untuk dicairkan sebagai persediaan baru diajukan kembali di periode berikutnya. Sehingga penginputan data harus dilakukan berkali-kali.

Namun secara keseluruhan dalam pelaporan persediaan dengan menggunakan aplikasi ASAP bukan penghambat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, justru mempermudah dan mempercepat output atas persediaan sehingga menghantarkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tercepat Se Indonesia dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Audit laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017-2020.

4.2 Upaya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mensinkronisasikan catatan persediaan dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP)

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dengan terus melakukan pendampingan terhadap setiap operator ASAP dari setiap OPD dimana setiap Operator ASAP dari masing OPD didampingi oleh tim

Admin dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para operator dari setiap OPD jika mengalami kesulitan dan permasalahan dalam proses penggunaan aplikasi ASAP. Selain itu selalu dilakukan pemeriksaan/pengecekan rutin setiap bulannya oleh masing admin untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan/selisih antara data persediaan pada aplikasi ASAP dengan data yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu upaya yang dilakukan dengan melakukan *Update* Aplikasi yang nantinya akan digunakan pada tahun 2020 dimana pada aplikasi terbaru ini akan ditambahkan menu-menu serta item rincian persediaan yang dibutuhkan sesuai dengan nomenklatur yang baru, dan pada tahun 2021 akan dilakukan sosialisasi serta pelatihan kembali terkait Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan yang terbaru untuk meningkatkan kemampuan operator ASAP di setiap OPD, sehingga memudahkan dalam penginputan data dan menghasilkan output yang akurat.

V. Simpulan

Dari pembahasan yang diuraikan dan penjelasan penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) serta masalah yang terjadi dan upaya yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara pelaporan laporan keuangan bahwa Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) sangat membantu mempermudah dan mempercepat dalam pelaporan persediaan dan kemudahan melihat *stock opname* pada saat pemeriksaan akhir atau penyesuaian dengan Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Objek namun jika dilihat dari sisi penggunaan aplikasi tersebut dalam penginputan seringkali terjadi kekeliruan dalam penginputan data dimana menu yang tersedia tidak sesuai dengan data yang diinput sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam penginputan dan dampak perubahan atas persediaan mengakibatkan penginputan yang berulang-ulang.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi kendala atas penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan dalam penyusunan laporan persediaan yaitu dengan cara pendampingan operator, pengecekan/pemeriksaan rutin, *update* aplikasi serta sosialisasi/pelatihan operator ASAP untuk masing-masing OPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamond Jack. 2002. “*Performance Budgeting–Is Accrual Accounting Required?*”. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2017. *Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN*. Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Jakarta. 113 Hal.
- Kieso dan Weygandt. 2015. *Intermediate Accounting*. Jakarta: Erlangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara